

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan hidup suatu negara. Menciptakan pembangunan yang berkesinambungan adalah hal yang penting yang harus dilakukan oleh sebuah Negara dengan tujuan untuk menciptakan kondisi bagi masyarakat untuk dapat menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat, umur panjang dan menjalankan kehidupan yang produktif. Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi yang paling penting adalah keberhasilan pembangunan manusia. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi disegala bidang pembangunan (BPS. 2011). Pembangunan ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, menanggulangi ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja. Salah satu indikator terpenting yang menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi adalah hal yang sering dikaitkan dengan pembangunan manusia. Menurut UNDP merumuskan pembangunan manusia sebagai suatu proses perluasan pilihan manusia dalam meningkatkan kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan,

pelayanan kesehatan, penghasilan, dan pekerjaan. Salah satu alat ukur atau indikator yang dapat dipakai untuk melihat perkembangan kualitas sumber daya manusia yang mampu memmbawa pada kondisi keberhasilan pembangunan yaitu *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (Baeti, 2013).

Indeks pembangunan manusia diperkenalkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan HDR (*Human Development Report*) (BPS. 2018). Indeks pembangunan manusia (IPM) atau dikenal dengan *Human Development Index (HDI)* merupakan tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas manusia disetiap negara. IPM mempunyai tiga unsur yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai dan standar kehidupan atau sering disebut ekonomi. Jadi, ketiga unsur tersebut sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu provinsi untuk meningkatkan IPMnya (BPS, 2014).

Sejak pertama kali diperkenalkan, IPM menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan pembangunan manusia. Berbagai negara mengadopsi konsep pembangunan manusia yang digagas UNDP dan tidak sedikit yang mencoba mengaplikasikan perhitungan IPM di negaranya. Indonesia turut ambil bagian dalam mengaplikasikan konsep pembangunan manusia, Indonesia pertama kali menghitung IPM pada tahun 1996. Sejak saat itu IPM dihitung secara berkala setiap tiga tahun. Namun, sejak 2014 IPM dihitung setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan Kementrian

Keuangan dalam menghitung Dana Alokasi Umum (DAU). Indonesia mulai mengaplikasikan penghitungan IPM dengan metode baru tahun 2014. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IPM di Indonesia sampai saat ini meliputi angka harapan hidup saat lahir yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita yang mewakili dimensi standar hidup layak (BPS, 2015).

Konsep pembangunan manusia tidak berdiri sendiri sebagai sesuatu yang eksklusif. Konsep pembangunan yang ada masih berkaitan dengan konsep pembangunan manusia. Pembangunan manusia bukan hanya produk dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sekaligus merupakan input penting untuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia harus berjalan beriringan secara simultan. Pembangunan manusia selalu menjadi isu penting dalam perancangan dan strategi pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2015, *Millenium Development Goals (MDGs)* memasuki batas tahun pencapaian. Agenda *MDGs* tidak akan berhenti di tahun 2015, namun berlanjut dengan mengembangkan konsep dalam konteks kerangka / agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Konsep *SDGs* ini terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *depletion* sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Ada

beberapa tujuan *SDGs* yang harus dicapai berhubungan dengan pembangunan manusia, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk disegala usia, menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua (BPS, 2015). Sejak tahun 1990, UNDP tidak pernah absen dalam mencatat perkembangan pembangunan manusia diberbagai negara. Pada tahun 2015 UNDP mencatat IPM Indonesia mencapai 68,9 dan masih menyandang predikat “sedang” dalam status pembangunan manusia.

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia Asia Tenggara (persen)

Negara	2015	2016
Singapura	92,5	92,6
Brunai Darussalam	86,5	86,6
Malaysia	78,9	79,9
Thailand	74,0	74,3
Indonesia	68,9	69,2
Filipina	68,2	68,5
Vietnam	68,3	68,8
Laos	58,6	6,90
Kamboja	56,3	56,8
Myanmar	55,6	56,0

Sumber Data: *United Nations Development Programme*.

Pada tabel 1.1 dapat dilihat data IPM dari negara – negara tetangga di Asia Tenggara tahun 2015, dimana posisi IPM Indonesia berada pada urutan ke 5 diantara negara – negara di Asia Tenggara lainnya. IPM Indonesia pada tahun 2015 yaitu sebesar 68,9 % berada satu peringkat diatas Filipina (68,2 %) namun jauh dibawah Singapura (92,5 %), Brunei Darussalam (86,5 %), Malaysia (78,9 %), dan Thailand (74,0 %). Pada tahun 2016, Indonesia masih menduduki peringkat ke 5, yaitu sebesar 69,2 %. Berada satu tingkat diatas Filipina (69,2 %). Namun masih jauh dibawah Singapura (92,6 %), Brunei Darussalam (86,6 %), Malaysia (79,9 %), dan Thailand (74,3 %).

Pada tahun 1999 peringkat IPM di Indonesia masih sangat rendah yaitu peringkat ke 105 dari 162 negara dan peringkat ke 6 di antara negara-negara di ASEAN. Peringkat ini masih dibawah negara-negara ASEAN lainnya, tetapi IPM di Indonesia masih diatas peringkat negara Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Singapura menempati peringkat teratas di antara negara-negara ASEAN disusul Brunei, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Tahun-tahun berikutnya peringkat Indonesia terus semakin terpuruk, bahkan peringkat IPM Vietnam melampaui Indonesia mulai tahun 2002. Peringkat IPM Indonesia hanya sedikit lebih tinggi dibanding Vietnam, Myanmar, dan Kamboja semenjak tahun tersebut hingga tahun 2011. (Kuncoro, 2015). Dalam laporan Pembangunan Manusia oleh UNDP, tahun 2015 mencatat IPM negara Indonesia berada ditingkat 113 dari 188 negara di dunia. IPM di 33 Provinsi di Indonesia masih mengalami perbedaan yang signifikan.

Tabel 1.2
IPM per Provinsi tahun 2012-2016 (persen)

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	67,81	68,3	68,81	69,45	70
Sumatera Utara	67,74	68,36	68,87	69,51	70
Sumatera Barat	68,36	68,91	69,36	69,98	70,73
Riau	69,15	69,91	70,33	70,84	71,2
Jambi	66,94	67,76	68,24	68,89	69,62
Sumatera Selatan	65,79	66,16	66,75	67,46	68,24
Bengkulu	66,61	67,5	68,06	68,59	69,33
Lampung	64,87	65,73	66,42	66,95	67,65
Kep. Bangka Belitung	67,21	67,92	68,27	69,05	69,55
Kep. Riau	72,36	73,02	73,4	73,75	73,99
DKI Jakarta	77,53	78,08	78,39	78,99	79,6
Jawa Barat	67,32	68,25	68,8	69,5	70,05
Jawa Tengah	67,21	68,02	68,78	69,49	69,98
DI Yogyakarta	76,15	76,44	76,81	77,59	78,38
Jawa Timur	66,74	67,55	68,14	68,95	69,74
Banten	68,92	69,47	69,89	70,27	70,96
Bali	71,62	72,09	72,48	73,27	73,65
Nusa Tenggara Barat	62,98	63,76	64,31	65,19	65,81
Nusa Tenggara Timur	60,81	61,68	62,26	62,67	63,13
Kalimantan Barat	63,41	64,3	64,89	65,59	65,88
Kalimantan Tengah	66,66	67,41	67,77	68,53	69,13
Kalimantan Selatan	66,68	67,17	67,63	68,38	69,05
Kalimantan Timur	72,62	73,21	73,82	74,17	75,59
Sulawesi Utara	69,04	69,49	69,96	70,39	71,05
Sulawesi Tengah	65	65,79	66,43	66,76	67,47
Sulawesi Selatan	67,26	67,29	68,49	69,15	69,76
Sulawesi Tenggara	67,07	67,55	68,07	68,75	69,31
Gorontalo	64,16	64,7	65,17	65,86	66,29
Sulawesi Barat	61,01	61,53	62,24	62,96	63,6
Maluku	65,43	66,09	66,47	67,05	67,6
Maluku Utara	63,93	64,78	65,18	65,61	66,63
Papua Barat	60,3	60,91	61,28	61,73	62,21
Papua	55,55	56,25	56,75	57,25	58,05
Indonesia	67,7	68,31	68,9	69,55	70,18

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS), 2010-2016

Pada tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa persebaran presentase IPM di Indonesia belum merata. Capaian pembangunan manusia tertinggi pada level provinsi di Indonesia dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta yang memiliki

IPM sebesar 79,60% pada tahun 2016. Sedangkan Provinsi Papua dari tahun 2012-2016 memiliki IPM yang paling rendah diantara provinsi-provinsi yang lain. Pada tahun 2016 IPM Provinsi Papua sebesar 58,05%, angka ini masih jauh dibawah IPM Indonesia secara keseluruhan yaitu 70,18%.

Disaat Indonesia mendapatkan predikat pembangunan manusia pada kategori “sedang”, capaian di tingkat regional provinsi cukup bervariasi. Terdapat delapan provinsi yang sudah mencapai kategori “tinggi” untuk pembangunan manusia di Indonesia, kedelapan provinsi tersebut meliputi Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kep. Riau, Riau, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Utara, dan Banten. Selain itu, sebagian besar provinsi di Indonesia yang sudah sampai pada kategori “sedang” dalam pembangunan manusia, dan hanya tinggal satu provinsi saja yang masih di level “rendah”, yaitu Provinsi Papua. Hal ini diakibatkan bahwa kurangnya peranan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan masyarakat terhadap ketiga bidang yaitu: pendidikan, ekonomi, dan kesehatan pada Provinsi Papua.

Hingga saat ini, tantangan pembangunan manusia di Indonesia yang masih memerlukan perhatian serius adalah kesenjangan capaian pembangunan manusia antarwilayah. Kesenjangan pembangunan manusia antarkabupaten/kota di dalam provinsi masih relatif tinggi, terutama kesenjangan di Provinsi Papua. Kesenjangan pembangunan manusia antar kabupaten dengan kota juga menjadi persoalan penting. Ketimpangan yang mencolok juga terjadi antara wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur. Kunci kebijakan untuk meningkatkan kemajuan serta mengurangi

kesenjangan pembangunan antarwilayah harus berprinsip pada hakikat pembangunan manusia. Untuk itu, program pembangunan daerah harus direncanakan dengan baik dalam rangka meningkatkan pemerataan kualitas kehidupan manusia.

Peningkatan kapabilitas dasar manusia merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan potensi bangsa yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas manusia. Pendidikan dan kesehatan menjadi modal utama yang harus dimiliki suatu bangsa untuk meningkatkan potensinya. Oleh karena itu, untuk menciptakan manusia yang berkualitas dapat dimulai dengan perbaikan pada kedua aspek tersebut. Apabila hal ini dilakukan dengan komitmen yang serius, harapan agar manusia Indonesia memiliki umur panjang dan sehat, berpengetahuan, dan hidup layak dapat tercapai.

Dengan melihat kenyataan angka IPM 33 Provinsi di Indonesia maka peran dan tanggung jawab pemerintah menjadi semakin penting, karena harus mampu untuk melakukan fungsi alokasi atas seluruh sumber daya untuk meningkatkan seluruh kebutuhan publik sehingga tercapai kesejahteraan sosial masyarakat, tentunya hal ini yang menjadi prioritas adalah pelayanan publik menyangkut sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian yang menjadi inti dari konsep pembangunan manusia.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia periode 2012-2016?

2. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia periode 2012-2016?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia periode 2012-2016?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk dapat melakukan penelitian dengan baik, maka peneliti harus mempunyai tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia periode 2012-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran di Indonesia periode 2012-2016.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat / kontribusi kepada:

1. Bagi peneliti, agar peneliti dapat mengembangkan ilmu yang didapat serta dapat mengetahui kesejahteraan penduduk Indonesia dilihat dari setiap wilayah provinsi di Indonesia.
2. Bagi pemerintah, agar pemerintah dapat merencanakan kebijakannya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dengan

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

3. Bagi institusi pendidikan, yaitu agar dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi pelajar atau mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia.

E. METODE PENELITIAN

1. Alat dan Model Analisis

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia adalah analisis regresi data panel. Adapun model ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$IPM = f(GROWTH, KMS, UEMP)$$

$$IPMit = \beta_0 + \beta_1 GROWTH_{it} + \beta_2 KMS_{it} + \beta_3 UEMP_{it} + e$$

Keterangan:

IPM	: Indeks pembangunan manusia (IPM)
GROWTH	: Tingkat laju pertumbuhan ekonomi (%)
KMS	: Tingkat kemiskinan (%)
UEMP	: Tingkat pengangguran (%)
β_0	: Konstanta
β_i	: Koefisien regresi masing-masing variabel
i	: <i>Cross Section</i>
t	: <i>time series</i>
e	: <i>error term</i>

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumberkan pada laporan Badan Pusat Statistik, khususnya pada tahun 2012-2016. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan dari *time series* yaitu periode 2012-2016 dan *cross section* adalah 33 provinsi di Indonesia periode 2012-2016. Data yang diteliti meliputi variabel Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penulisan, rumusan penulisan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai teori-teori yang sesuai topik dan skripsi yang dapat membantu penelitian, dan tinjauan pustaka peneliti terdahulu.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

4. BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum penelitian dan analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian.

5. BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran sesuai dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN